

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KARANGANYAR NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2025



PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Landasan Hukum.....	I.2
1.3 Maksud dan Tujuan	I.3
1.4 Sistematika Penulisan	I.4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN TRIWULAN II TAHUN 2025	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 Triwulan II (Semester I).	II.1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono	II.38
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono	II.39
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renja	III.1
3.2 Program dan Kegiatan.....	III.2
3.3 Indikator Kinerja Pelayanan OPD.....	III.10
3.4.Dana Indikatif	III.11
BAB IV PENUTUP	
4.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	IV.1
4.2 Kaidah Pelaksanaan.....	IV.1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Kesesuaian antara Renja dan Rentra Kecamatan Jumantono tahun 2025	II.2
Tabel	2.2	Kesesuaian antara KPD dan Renja Kecamatan Jumantono tahun 2025	II.13
Tabel	2.3	Kesesuaian Antara Renja dan APBD Kecamatan Jumantono Tahun 2025	II.21
Tabel	2.4	Realisasi Penyerapan Anggaran sampai dengan Bulan Juni 2025	II.28
Tabel	2.5	Realisasi Kinerja (Capaian indicator) sampai Bulan Juni 2025	II.35
Tabel	3.1	Perubahan Target Indikator Tujuan-Sasaran Kecamatan Jumantono tahun 2025	III.1
Tabel	3.2	Perubahan Program, Kegiatan, subkegiatan dan Pagu Indikatif Tahun 2025	III.3
Tabel	3.3	Perbandingan Program, Kegiatan, Subkegiatan Dan Pagu Indikatif Renja, APBD dan Renja Perubahan tahun 2025	III.11

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Diagram Venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Rentra dan Renja Tahun 2025	II.10
Gambar	2.2	Diagram venn Program, Kegiatan dan sub Kegiatan Antara RKPD dengan Renja tahun 2025	II.11
Gambar	2.3	Diagram venn Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara APBD dan Renja Tahun 2025	II.27
Gambar	3.3	Skema (flowchart) Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kecamatan Jumantono Tahun 2025	III.10

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas ridho-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Karanganyar.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 ini masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kritik dan saran yang positif untuk perbaikan dalam hal penyusunan maupun isi dan fungsi Rencana Pembangunan Daerah tentu sangat kami harapkan.

Sebagai akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA-OPD Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2025.

Jumantono, Juni 2025

CAMAT JUMANTONO



GUNAWAN, S.E., M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19671223 199401 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan diperlukan oleh semua Organisasi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah guna mencapai tujuan. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan disusun dengan menggunakan 4 pendekatan yaitu teknokratik, partisipatif, politis serta atas bawah dan bawah atas sesuai aspirasi Masyarakat dan arahan Pemerintah Pusat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 261 ayat (1).

Untuk mewujudkan hal tersebut Pasal 264 ayat (5) mengamanatkan penyusunan perubahan rencana pembangunan daerah. Pasal ini memberikan penegasan perubahan yang mendasar dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah dengan lebih memperhatikan serius permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pembangunan daerah untuk dapat dipecahkan bersama dan dapat dipertanggungjawabkan. Adanya perubahan kebijakan pembangunan baik pusat maupun daerah, serta adanya perubahan pendapatan daerah yang harus dibelanjakan karena adanya kebutuhan daerah yang harus dipenuhi, mengakibatkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 perlu ada penyesuaian, sehingga Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 ayat (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah berkenaan; dan/atau
- b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 diperlukan karena adanya beberapa perubahan kebijakan dan permasalahan yang timbul di Tahun 2025, diantaranya :

- a) Penyesuaian terhadap kebijakan dan pengaturan penggunaan dana, karena adanya efisiensi anggaran di tahun 2025.
- b) Hasil evaluasi yang mengharuskan adanya perubahan. Hasil evaluasi triwulan I Tahun 2025 dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang membuat Perangkat Daerah untuk menyusun ulang penggunaan dan kebutuhan anggarannya.

Namun demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Jumantono Tahun 2025 tetap disusun dalam kerangka kebijakan mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 “Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dengan Semangat Reformasi Birokrasi”, dengan sasaran “Meningkatkan kualitas Tata Laksana Pemerintahan”, dan tujuan yang kedua “Meningkatkan Pemerataan Pembangunan dan Perlindungan Sosial” dengan sasaran “Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa”.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar tahun 2025 dilandasi dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 10).
16. Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar adalah:

Maksud :

1. Memenuhi Amanat Undang –undang dan peraturan yang telah ditentukan / ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Memperbaiki dan menentukan prioritas-prioritas kegiatan Kecamatan Jumantono Tahun 2025.
3. Mempermudah pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi dan analisis kegiatan baik secara internal maupun eksternal serta pelaksanaan koordinasi.

Tujuan:

1. Tersedianya rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Jumantono;

2. Tersedianya dokumen sebagai dasar dalam pengendalian monitoring, evaluasi dan pengukuran kinerja Kecamatan Jumantono;
3. Terwujudnya konsistensi dan sinkronisasi dengan perencanaan Pembangunan tingkat lebih tinggi (RKPD, RENSTRA dan RPD);
4. Tercapainya target tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan rencana kerja dan kemampuan anggaran daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumantono, yang diuraikan dalam subbab-subbab agar dapat dipahami dengan baik.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Jumantono, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perubahan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Jumantono.

1.3. Maksud dan Tujuan

Membuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumantono.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025

Bagian ini menguraikan pelaksanaan rencana kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 sampai Triwulan II , yang diuraikan dalam subbab berikut

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 Triwulan II dan Capaian Renstra Kecamatan Jumantono.

Sub bab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Jumantono tahun 2025 sampai Semester I dan evaluasinya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Jumantono

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jumantono berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jumantono, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono

Berisikan uraian mengenai hasil analisis dan evaluasi yang menjadi isu di Kecamatan Jumantono untuk di tindaklanjuti dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono.

BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN JUMANTONO TAHUN 2025

Disajikan dalam bentuk matrik perubahan rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan tidak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN JUMANTONO SAMPAI BULAN MEI TAHUN 2025

Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan renja tersebut dengan dokumen perencanaan di atasnya dan realisasi anggaran dan capaian target indikator. Evaluasi dilakukan dengan berfokus pada aspek konsistensi dan realisasi program, kegiatan dan subkegiatan, sehingga dapat diketahui kekurangan, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono sampai Bulan Mei Tahun 2025 .

Pada subbab ini diuraikan terkait dengan konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan (rencana) dan pelaksanaan (penganggaran), yang meliputi:

2.1.1. Hubungan antar Dokumen Perencanaan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2024-2026 dengan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumantono untuk Tahun 2025, yaitu terhadap Renstra (LAMPIRAN XXI PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024-2026) dengan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut, untuk melihat konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran OPD. Hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Kesesuaian antara Renja dan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENSTRA		RENJA 2025		KETERANGAN	
						Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				Unsur Kewilayahan		100%	2.953.889.400		2.513.266.507		- 400.622.893
7.01				Kecamatan			2.953.889.400		2.513.266.507		- 400.622.893
7.01				Kecamatan Jumantono			2.953.889.400		2.513.266.507		- 400.622.893
7.01	01.2	1		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	2.600.000.000	95%	2.250.152.857	<	- 392.672.143
7.01	01.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.421.000	95%	8.872.680	<	- 4.548.320
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4.629.000	2 Dok	4.867.100	=	- 238.100
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	8.792.000	15 Lap	4.005.580	>	- 4.786.420

7.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	95%	1.862.415.400	95%	1.672.644.027	=	- 189.771.373
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/ Bulan	1.862.415.400	13 Orang/ Bulan	1.672.644.027	=	- 189.771.373
7.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95%	238.977.000	95%	183.759.750	=	-55.217.250
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	12 Paket	10.580.000	12 paket	4.638.250	=	-5.941.750
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	11.500.000	12 paket	0	=	-11.500.000
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	7.935.000	12 paket	6.300.000	=	-1.635.000
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	11.030.000	12 paket	6.800.000	=	-4.230.000
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari , 12 bulan	3.651.000	2 exp, 1 hari , 12 bulan	6.000.000	=	2.349.000

7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	188.531.000	12 Lap	158.197.500	=	-30.333.500
7.01	01.2	6	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	5.750.000	6 Dok	1.824.000	=	-3.926.000
7.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	63.706.600	100%	42.825.000	=	- 20.881.600
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	-		-
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	63.706.600	-	42.825.000	<	- 20.881.600
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	-	-	-	-	=	-
7.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	357.842.000	100%	282.418.600	=	- 75.423.400
7.01	01.0 2	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	1.270.000	12 Lap	600.000	=	- 670.000
7.01	01.0 2	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	41.262.000	12 Lap	40.800.000	=	- 462.000

7.01	01.0 2	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	315.310.000	12 Lap	241.018.600	=	- 74.291.4000
7.01	01.0 2	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	63.638.000	100%	59.632.800	=	- 4.005.200
7.01	01:0 2	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	33.043.000	2 unit	37.630.000	=	- 4.587.000
7.01	01:0 2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	23.991.000	9 unit	16.680.000	=	- 7.311.000
7.01	01:0 2	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	-	-	0	0	=	0
7.01	01:0 2	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	6.604.000	2 unit	5.322.800	=	- 1.281.200
7.01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	89 Nilai	6.640.000	89 Nilai	6.237.150	=	- 402.850
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Penderintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	89 Nilai	6.640.000	89 Nilai	6.237.150	=	- 402.850

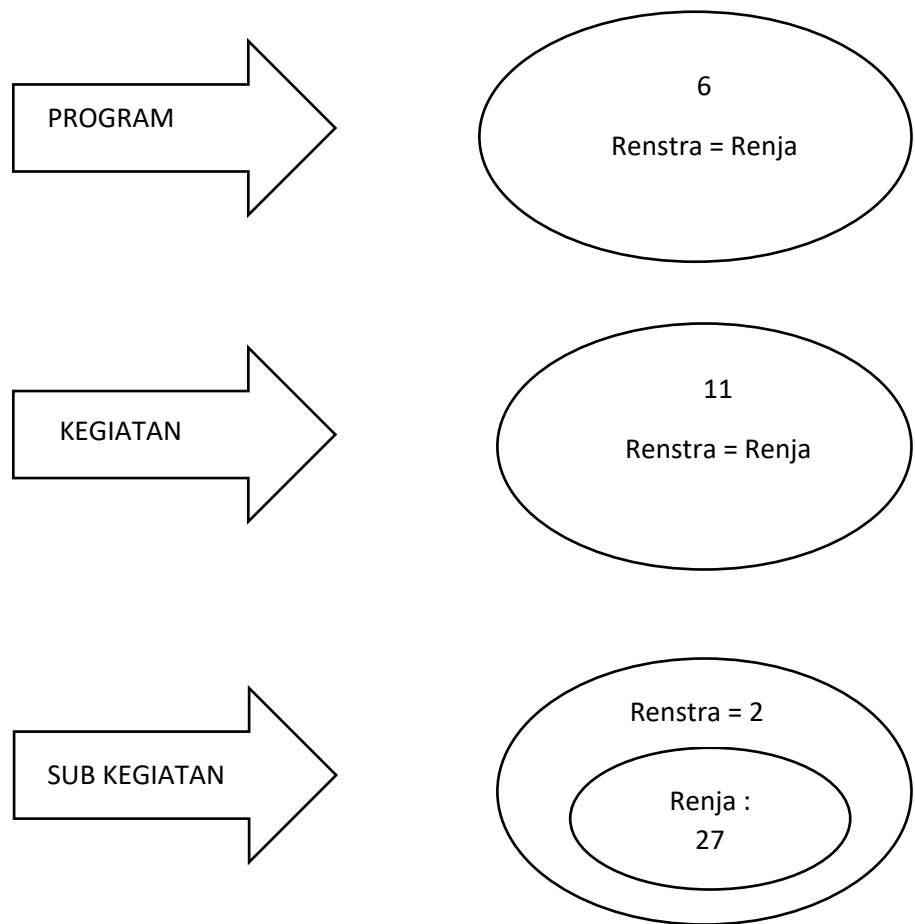
7.01	02.2	2	1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	6.640.000	12 Laporan	6.237.150	≠	- 402.850
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	-	0	-	0	=	0
7.01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	31.500.000	100%	14.438.400	=	- 17.061.600
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	31.500.000	100%	14.438.400	=	- 7.061.600
7.01	03.0 2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.500.000	11 Lembaga	10.150.700	=	-Rp 349.300
7.01	03.0 2	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	5.250.000	11 Lembaga	4. 287.700	=	-Rp 962.300
7.01	03.0 2	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	11 Lembaga	15.750.000	11 Laporan	-	=	-Rp 15.750.000

7.01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100%	160.559.000	100%	126.263.000	=	- 42.324.000
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	168.587.000	100%	126.263.000	=	- 42.324.000
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	168.587.000	12 Laporan	126.263.000	=	- 42.324.000
7.01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100%	80.896.200	100%	73.050.950	=	- 7.845.250
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	80.896.200	100%	73.050.950	=	- 7.845.250
7.01	05.2	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	100%	57.960.000	75 orang	48.000.000	<	- 9.960.000

				Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	22.936.200	360 orang	25.050.950	≠	2.114.750
7.01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	66.276.000	100%	43.124.150	=	- 23.151.850
7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	66.276.000	100%	43.124.150	=	- 23.151.850

7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	21.126.000	11 dokumen	13.782.700	≠	- 7.343.300
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	100%	23.474.850	11 dokumen	18.205.050	≠	- 5.269.800
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	7.185.150	0	0	<	- 7.185.150
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	100%	14.490.000	11 dokumen	11.136.400	≠	- 3.353.600

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar : 2.1

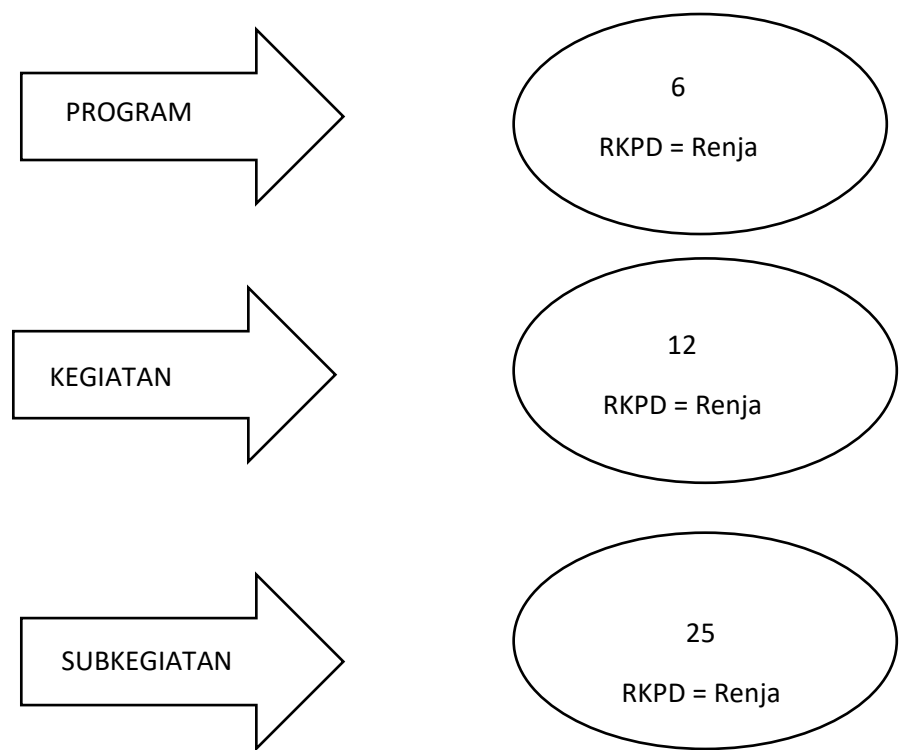
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara Renstra 2024-2026 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan Renstra adalah sebagai berikut :

- 1) Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - Program terdapat konsistensi sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra)
 - Kegiatan konsistensi sebesar : 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Program dalam Renstra);
 - Subkegiatan konsistensi sebesar : $(27/29) \times 100\% = 93,10\%$ (Terdapat 2 Subkegiatan dalam Renstra yang tidak terdapat dalam Renja), sehingga dapat dikatakan bahwa Renja 93,10% sesuai dengan Renstra, karena hampir semua subkegiatannya terdapat dalam Renstra, 2 subkegiatan dalam renstra yang tidak terdapat dalam Renja 2025 adalah :
 - 1. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 2. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- 2) Kesesuaian indikator dan target
 - Indikator antara Renja dengan Renstra 100 % sama.
- 3) Kesesuaian alokasi anggaran
 - Pada semua program, kegiatan dan subkegiatan mengalami perbedaan alokasi anggaran. Terdapat perbedaan Jumlah pagu indikatif dalam

- Renja Rp. 2.513.266.507,- tidak sesuai dengan Pagu Indikatif dalam Renstra: Rp. 2.953.889.400.- Hal ini ini disebabkan oleh alokasi anggaran dalam renja lebih mendekati kondisi riil, sesuai kemampuan keuangan daerah dan alokasi dana bagi Kecamatan Jumantono;
- Perbedaan alokasi terbesar di subkegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN =Rp. 400.622.893,-.
- 2.1.2. Hubungan antar Dokumen RKPD Tahun 2025 dengan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025;
- Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumantono untuk Tahun 2025, yaitu terhadap rancangan Renstra, RKPD dan Renja Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan pada 2 dokumen perencanaan tersebut. hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jumantono dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan RKPD Tahun 2025.

Secara singkat digambarkan dalam diagaram venn berikut ini :



Gambar : 2.2

Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan RKPD dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan

- Program konsistensi sebesar 100% (6 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD);
 - Kegiatan konsistensi sebesar 100% (12 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD)
 - Subkegiatan konsistensi sebesar 100% (25 Program dalam Renja sama dengan Program dalam RKPD).
2. Kesesuaian Indikator dan target
 - Tidak terdapat perbedaan indicator dan target pada subkegiatan renja maupun renstra.
 3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Pagu Indikatif antara RKPD dan Renja konsisten sebesar 100 %

Tabel 2.2.

Kesesuaian antara RKPD Tahun 2025 dan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RKPD		RENJA 2025		KET	
						Target	Pagu indikatif	Target	Pagu indikatif	Target	Rp
						Kinerja	(Rp.000)	Kinerja	(Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7				Unsur Kewilayahan			2.513.266.507		2.513.266.507	=	0
7.01				Kecamatan			2.513.266.507		2.513.266.507	=	0
7.01				Kecamatan Jumantono							0
7.01	01.2	1		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	96%	2.207.327.857	95%	2.207.327.857	=	0
7.01	01.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.872.680	95%	8.872.680	=	0
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Lap	4.867.100	2 Lap	4.867.100	=	0
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	4.005.580	2 Lap	4.005.580	=	0

7.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.672.644.027	100%	1.672.644.027	=	0
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	15 Orang/Bulan	1.672.644.027	15 Orang/Bulan	1.672.644.027	=	0
7.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	183.759.750	100%	183.759.750	=	0
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	12 Paket	10.580.000	12 paket	10.580.000	=	0
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	11.500.000	2 paket	11.500.000	=	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	7.935.000	12 paket	7.935.000	=	0
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	11.030.000	12 paket	11.030.000	=	0
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari, 12 bulan	3.651.000	2 exp, 1 hari, 12 bulan	3.651.000	=	0
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	188.531.000	12 Lap	188.531.000	=	0

7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	5.750.000	6 Dok	5.750.000	=	0
7.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	0	0	0	0	=	0
7.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	282.418.600	100%	282.418.600	=	0
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	600.000	12 Lap	600.000	=	0
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	40.800.000	12 Lap	40.800.000	=	0
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	241.018.600	12 Lap	241.018.600	=	0
7.01	01.02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	59.632.800	100%	59.632.800	=	0
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	37.630.000	2 unit	37.630.000	=	0

7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	16.680.000	9 unit	16.680.000	=	0
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	0	-	0	=	0
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	5.322.800	2 unit	5.322.800	=	0
7.01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	89 Nilai	6.237.150	89 Nilai	6.237.150	=	0
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Pengerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1 Nilai	6.237.150	85,1 Nilai	6.237.150	=	0
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	6.237.150	12 Laporan	6.237.150	=	0
7.01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	14.438.400	100%	14.438.400	=	0
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	14.438.400	100%	14.438.400	=	0

7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.150.700	11 Lembaga	10.150.700	=	0
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	4. 287.700	11 Lembaga	4. 287.700	=	0
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-		-	-	=	0
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-	-	-	=	0
7.01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100%	126.263.000	100%	126.263.000	=	0
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	126.263.000	100%	126.263.000	=	0
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	126.263.000	11 Laporan	126.263.000	=	0

7.01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100%	73.050.950	100%	73.050.950	=	0
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	73.050.950	100%	73.050.950	=	0
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	48.000.000	75 orang	48.000.000	=	0
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	25.050.950	360 orang	25.050.950	=	0
7.01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	43.124.150	100%	43.124.150	=	0

7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	43.124.150	100%	43.124.150	=	0
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	13.782.700	11 dokumen	13.782.700	=	0
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	11 dokumen	18.205.050	11 dokumen	18.205.050	=	0
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0	0	0	0	=	0
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11 dokumen	11.136.400	11 dokumen	11.136.400	=	0

2.1.3. Hubungan antara Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 dengan APBD Tahun 2025;

Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan di Kecamatan Jumantono untuk Renja Tahun 2025, yaitu terhadap APBD Tahun 2025. Dimaksudkan untuk membandingkan antara rencana alokasi dana dan realisasi dana dalam APBD untuk program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Hasil evaluasi dapat diketahui kinerja pencapaian target Renja dan RKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Jumantono dengan pagu APBD Tahun 2025. Berdasarkan program, kegiatan dan subkegiatan serta pagu anggaran tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Kesesuaian Renja dengan APBD Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	RENJA	APBD	Keterangan
						Pagu indikatif	Pagu indikatif	%
						(Rp.000)	(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7				Unsur Kewilayahan		2.513.266.507	2.563.266.507	1,02%
7.01				Kecamatan		2.513.266.507	2.563.266.507	1,02%
7.01				Kecamatan Jumantono				
7.01	01.2	1		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	2.207.327.857	2.303.404.257	1,04%
7.01	01.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.872.680	8.872.680	100%
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.867.100	4.867.100	100%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.005.580	4.005.580	100%
7.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.672.644.027	1.722.644.027	1%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.672.644.027	1.722.644.027	1%

7.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	183.759.750	184.175.550	1%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	10.580.000	5.054.050	0,48%
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.500.000	0	0%
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	7.935.000	6.300.000	0,8%
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	11.030.000	6.800.00	0,6%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	3.651.000	6.000.000	1,6%
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	188.531.000	158.197.500	0,8%
7.01	01.2	6	#	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.750.000	1.824.000	0,3%
7.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	42.825.000	100%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0	0%
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	42.825.000	100%

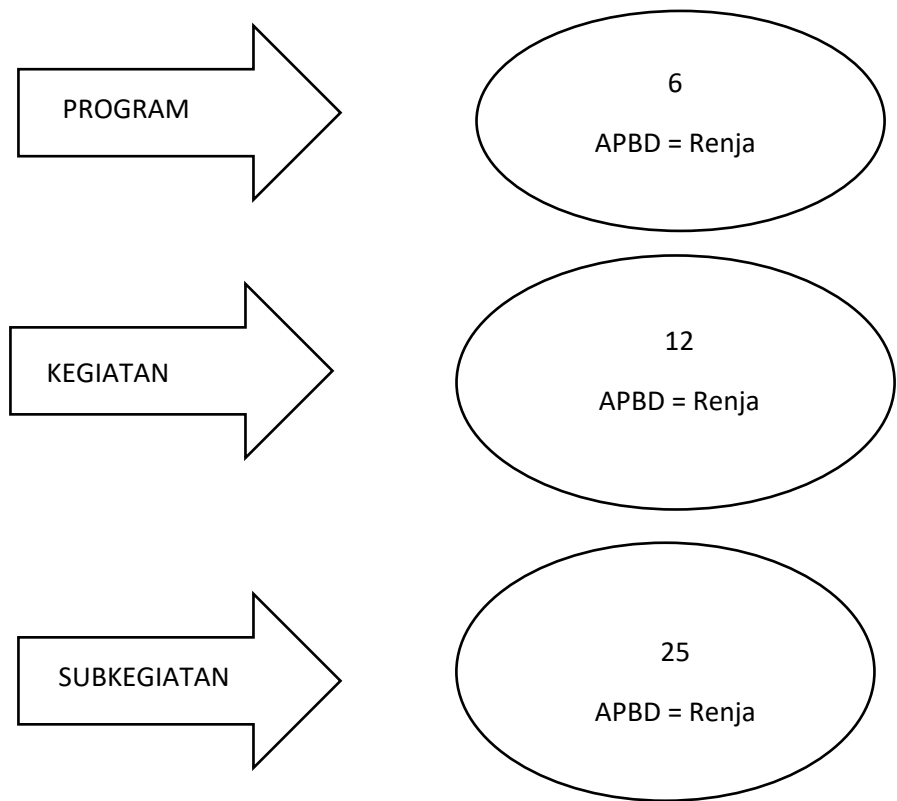
7.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	282.418.600	283.418.600	100,4%
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	600.000	600.000	100%
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	40.800.000	40.800.000	100%
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	241.018.600	242.018.600	100,4%
7.01	01.02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	59.632.800	61.468.400	100,3%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	37.630.000	37.630.000	100%
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	16.680.000	16.680.000	100%
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	0	0%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.322.800	7.158.400	134%
7.01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	6.237.150	6.245.750	100,1%

7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	6.237.150	6.245.750	100,1%
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	6.237.150	6.245.750	100,1%
7.01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	14.438.400	14.438.400	100%
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	14.438.400	14.438.400	100%
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	10.150.700	10.150.700	100%
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4. 287.700	4. 287.700	100%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	-	0%
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-	0%
7.01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	126.263.000	126.263.000	100%

7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	126.263.000	126.263.000	100%
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	126.263.000	126.263.000	100%
7.01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	73.050.950	72.010.950	98%
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.050.950	72.010.950	98%
7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	48.000.000	48.000.000	100%

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	25.050.950	24.010.950	95%
7.01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	43.124.150	40.904.150	94%
7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43.124.150	40.904.150	94%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	13.782.700	13.782.700	100%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18.205.050	15.985.050	87%
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-	0%
7.01	06.2	1	#	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11.136.400	11.136.400	100%

Secara singkat digambarkan dalam diagram venn berikut ini :



Gambar 2.3
Diagram Venn program, kegiatan dan subkegiatan antara APBD 2025 dengan Renja Tahun 2025

Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa untuk keterkaitan antara Renja dengan APBD adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan
 - konsistensi Program sebesar 100% (Program dalam Renja sama dengan Program dalam APBD)
 - Konsistensi Kegiatan sebesar 100% (Kegiatan dalam Renja sama dengan Kegiatan dalam APBD)
 - Konsistensi Subkegiatan sebesar 100%
2. Kesesuaian indikator dan target
Tidak terdapat perbedaan indikator dan target program, kegiatan dan subkegiatan
3. Kesesuaian alokasi anggaran
 - Jumlah pagu indikatif dalam Renja yaitu : Rp. 2.513.266.507,- sedangkan dalam APBD sebesar Rp. 2.563.266.507,- ada kenaikan sebesar Rp. 50.000.000.- atau (2%);

2.1.4. Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Jumantono Tahun 2025

Subbab ini memuat penjelasan / uraian hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 sampai Triwulan II dan evaluasinya. Tahun 2025 Kecamatan Jumantono melaksanakan 6 program dengan 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 2.563.266.507,-. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 capaian persentase realisasi keuangan program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan Tri Wulan II Tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD		REALISASI		Capaian Fisik (%)
						Traget Kinerja	Pagu indikatif (Rp.000)	(Rp.000)	%	
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
7				Unsur Kewilayahan			2.563.266.507	1.154.306.967	46	46
7.0 1				Kecamatan			2.563.266.507	1.154.306.967	46	46
7.0 1				Kecamatan Jumantono						
7.0 1	01.2	1		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya		2.303.404.257	1.111.730.242	48	48
7.0 1	01.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	8.872.680	3.528.528	39	39
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	4.867.100	2.419.700	50	50
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	4.005.580	1.108.828	28	28
7.0 1	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	1.722.644.027	892.163.836	52	52
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang /Bulan	1.722.644.027	892.163.836	52	52

7.0 1	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	184.175.550	82.776.825	43,8	43,8
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	12 Paket	5.054.050	3.425.475	68	68
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	6.300.000	2.085.000	33	33
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	6.800.000	2.069.000	30	30
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dok	6.000.000	2.500.000	42	42
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	158.197.500	72.697.350	46	46
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	1.824.000	0	0	0
7.0 1	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	42.825.000	-	0	0
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	-	-	-	0	0

7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	42.825.000	-	0	0
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	-	-	-	0	0
7.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	283.418.600	117.901.553	41,59	41,59
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	600.000	0	0	0
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	40.800.000	16.637.653	41	41
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	242.018.600	101.263.900	42	42
7.01	01.02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	61.468.400	15.359.500	27,5	27,5
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	37.630.000	11.259.500	30	30
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 unit	16.680.000	4.100.000	25	25
7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara		-	0	0	0

7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	7.158.400	0	0	0
7.01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	6.245.750	0	0	0
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Pengerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	6.245.750	0	0	0
7.01	02.2	2	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	12 Lap	6.245.750	0	0	0
7.01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	14.438.400	10.150.700	70,30	70,30
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	14.438.400	10.150.700	70,30	70,30
7.01	03.02	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	10.150.700	10.150.700	100	100
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Lembaga	4.287.700	0	0	0

7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa		-	-	0	0
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan		-	-	0	0
7.01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100%	126.263.000	51.250.000	41	41
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	126.263.000	51.250.000	41	41
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	126.263.000	51.250.000	41	41
7.01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagamaan	100%	48.000.000			
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	48.000.000			
								-		

7.01	05.2	01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	48.000.000			
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	360 Orang	24.010.950	0	0	0
7.0 1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDDes yang sesuai ketentuan	100%	43.124.150	4.750.000	14	14
7.0 1	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasidan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	43.124.150	4.750.000	14	14
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 dokumen	13.782.700	0	0	0
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendencygunaan Aset Desa	11 dokumen	15.985.050	0	0	0

7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		-	-		
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	11 dokumen	11.136.400	4.750.000	43	43

Dilihat dari komponen keuangan (anggaran) sampai Triwulan II di tahun 2025 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.177.880.942,- Atau 46 %

Capaian indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II adalah sebagaimana tabel :

Tabel 2.5
Realisasi Kinerja (Capaian Indikator) s/d Triwulan II 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD	Capaian Fisik % / Bukti Dukung
						Target Kinerja	
7				Unsur Kewilayahan			
7.0 1				Kecamatan			
7.0 1				Kecamatan Jumantono			
7.0 1	01.2	1		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	46
7.0 1	01.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	CakupanPerencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	39%
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	50%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 dokumen	28%
7.0 1	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	52%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bu lan	52%
7.0 1	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	43,8%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan banguna kantor yangDisediakan	12	68 %
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 paket	33 %
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 paket	30%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	12 Dokumen	42 %

7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	46 %
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	8 dokumen	0 %
7.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0%
7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	0 %
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	0	0 %
7.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90%	41,59%
7.01	01.02	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	0 %
7.01	01.02	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 laporan	41 %
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 laporan	42%
7.01	01.02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	27,5%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 unit	30 %
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	21%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	2 unit	25 %
7.01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	85,1 Nilai	0
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	85,1 Nilai	0
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	0
7.01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	70,30%
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan	100%	70,30%

7.0 1	03.0 2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga Kemasyar akatan	100%
7.0 1	03.0 2	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	0%
7.0 1	03.0 2	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	-
7.0 1	03.0 2	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	-
7.0 1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100%	41%
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	41%
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	11 Laporan	41%
7.0 1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	100%	0
7.01	05	0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		0
7.01	05.2	0 1	0 0 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 orang	0 %

7.01	05.2	1	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	360 orang	0 %
7.01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	14%
7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	14%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	11 Dokumen	0%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen	0%
7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	-
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	11 Dokumen	43 %

2.2 Analisis Kinerja Kecamatan Jumantono

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja (hasil) pelayanan Kecamatan Jumantono berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dan Analisa terhadap hasil evaluasinya, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Kecamatan Jumantono, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan yang di Kecamatan Jumantono terlihat adanya :

- Konsisten dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub Kegiatan;
- Terdapat 1 sub kegiatan yang dialokasikan dalam APDB tapi tidak dialokasikan dalam Renja yaitu sub kegiatan Penyediaan peralatan dan mesin lainnya
- Sampai Bulan Juni realisasi anggaran mencapai 39%;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Jumantono

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Jumantono tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Kecamatan. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 – 2026. Sedangkan RPD Tahun 2025 – 2026 merupakan acuan dari Renstra Kecamatan Tahun 2025 – 2026.

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum
6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pendidikan politik masyarakat.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kecamatan Jumantono dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Permasalahan Sekretariat:

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan

2. Seksi Tata Pemerintahan

- a. Kurangnya kualitas SDM aparatur desa dalam pelayanan kepada masyarakat;
- b. Masih rendahnya disiplin aparatur desa;
- c. Kurangnya intensitas pembinaan terhadap pemerintahan desa;
- d. Belum optimalnya pengelolaan administrasi keuangan desa;
- e. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;

3. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a. Belum optimalnya sosialisasi Perda;
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
- c. Belum optimalnya pembinaan Linmas desa;
- d. Belum optimalnya koordinasi dengan lembaga vertikal (Kepolisian RI dan TNI);

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah desa;
- b. Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
- c. Masih kurangnya pemahaman aparat desa terhadap kewenangan desa dalam pembangunan;

5. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam pendataan penerima program Kesejahteraan Sosial;
- b. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
- c. Menurunnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di masyarakat.

6. Seksi Pelayanan Umum

- a. Belum optimalnya Pelayanan Umum yang diberikan kepada Masyarakat;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana;
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset di Kecamatan;
- d. Belum optimalnya sistem kearsipan di Kecamatan;

Hasil analisis ini digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025, pada saat penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumantono diuraikan pada Bab III.

BAB III
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN JUMANTONO
TAHUN 2025

Hasil analisis dan evaluasi pada Bab II digunakan dalam memperbaiki Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025, yang hasilnya berupa Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025. Secara lengkap usulan rencana perubahan program, kegiatan dan subkegiatan Kecamatan Jumantono diuraikan pada Bab III.

Beberapa isu penting sebagai berikut :

- 1. Keterbatasan jumlah sumberdaya aparatur pemerintahan dengan kompetensi yang tidak merata
- 2. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana kecamatan dalam menunjang kinerja pelayanan maupun operasional petugas kecamatan.
- 3. Belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat.
- 4. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintahan desa yang belum optimal serta Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan.
- 5. Belum optimalnya Sinergitas dan koordinasi dalam upaya peningkatan keamanan dan ketertiban umum.
- 6. Belum optimalnya toleransi, kerukunan umat beragama, wawasan kebangsaan, bela negara serta pendidikan politik masyarakat.

3.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran Renja Tahun 2025 sesuai dengan rumusan Renstra Kecamatan Jumantono Tahun 2025-2026 adalah sebagaimana Tabel 3.1. dalam Renja Perubahan Tahun 2025, tidak dilakukan perubahan tujuan, sasaran dan indikator kecuali target sakip berubah.

Tabel 3.1
Perubahan Target Indikator Tujuan - Sasaran Kecamatan Jumantono Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Tahun Anggaran 2025		Keterangan
				sebelum	Sesudah	
I	Kecamatan Jumantono					
1	Tujuan :					
	1 Meningkatkan tata pemerintahan yang berkualitas dengan semangat Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	73	86	Naik
	2 Meningkatkan pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial	Angka Kemiskinan	%	8,96	8,96	=
2	Sasaran :					

	1	Meningkatkan Kualitas tata laksana Pemerintahan	Nilai SAKIP OPD	Nilai	75,60	75,60	=
	2	Meningkatkan kualitas Pembangunan Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai	0,9	0,9	=

3.2. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan Pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Karanganyar tahun 2024- 2026.

Program dan kegiatan Kecamatan Jumantono Perubahan Tahun 2025 direncanakan berdasarkan Analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rencana awal RKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan Kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di tahun 2025.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka program dan kegiatan kegiatan Kecamatan Jumantono di tahun 2025 adalah sebagaimana tertulis dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
 Perubahan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif tahun 2025

NO				URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / PROGRAM / KEGIATAN	APBD PENETAPAN		PERUBAHAN RENJA		NAIK TURUN	
						Target	Pagu	Target	Pagu indikatif	Rp	%
						Kinerja	(Rp.000)	Kinerja	(Rp.000)		
1				2	3	4	5	6	7	8=7-5	9=8/5
7				Unsur Kewilayahan		100%	Rp 2.563.266.507	100%	Rp 2.532.452.507	-Rp. 30.814.000	-1,2%
7.01				Kecamatan			Rp 2.563.266.507		Rp 2.532.452.507	-Rp. 30.814.000	-1,2%
7.01				Kecamatan Jumantono							
7.01	01.2	1		PROGAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Indikator OPD (IKU dan IKK) yang tercapai targetnya	100%	Rp 2.303.404.257	100%	Rp 2.286.740.257	-Rp 16.664.000	-2,8%
7.01	01.2	1	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	CakupanPerencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp 8.872.680		Rp 8.873.080	Rp -	0%
7.01	01.2	1	1	Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Lap	Rp 4.867.100	2 Lap	Rp 4.867.100	Rp -	0%
7.01	01.2	1	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Lap	Rp 4.005.580	14 Lap	Rp 4.005.980	Rp 400	1%

7.01	01.2	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Rp 1.722.644.027	100%	Rp 1.722.644.027	Rp 0	0%
7.01	01.2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	Rp 1.722.644.027	13 Orang/Bulan	Rp 1.722.644.027	Rp 0	0%
7.01	01.2	6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Rp 184.175.550	100%	Rp 160.535.650	-Rp 23.639.900	-0,9%
7.01	01.2	6	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang Disediakan	12 Paket	Rp 5.054.050	12 paket	Rp 7.974.050	Rp 2.920.000	1,6%
7.01	01.2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	Rp 0	12 paket	Rp -	Rp 0	0%
7.01	01.2	6	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang di sediakan	12 Paket	Rp 6.300.000	12 paket	Rp 6.300.000	Rp -	0%
7.01	01.2	6	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	Rp 6.800.000	12 paket	Rp 6.800.000	Rp 0	0%
7.01	01.2	6	6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan yang Disediakan	2 exp, 1 hari , 12 bulan	Rp 6.000.000	12 Dokumen	Rp 6.000.000	Rp -	0%
7.01	01.2	6	9	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Lap	Rp 158.197.500	12 laporan	Rp 131.637.600	-Rp 26.559.900	-0,8%
7.01	01.2	6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dok	Rp 1.824.000	8 dokumen	Rp 1.824.000	Rp -	0%
7.01	01.2	7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 42.825.000	100%	Rp 42.825.000	Rp 0	0%

7.01	01.2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	0	Rp -	0	Rp 0	Rp 0	0%
7.01	01.2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp 42.825.000	2 unit	Rp 42.825.000	Rp 0	0%
7.01	01.2	7	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas yang Tersedia	0	Rp -	0	Rp 0	Rp 0	0%
7.01	01.2	8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Rp 283.418.600	100%	Rp 290.394.100	Rp 6.750.500	1%
7.01	01.2	8	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	12 Lap	Rp 600.000	12 laporan	Rp 600.000	Rp 0	0%
7.01	01.2	8	2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan listrik	12 Lap	Rp 40.800.000	12 laporan	Rp 40.800.000	Rp 0	8%
7.01	01.02	8	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa/tenaga kebersihan kantor	12 Lap	Rp 242.018.600	12 laporan	Rp 248.994.100	Rp 6.750.500	1%
7.01	01.02	9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Rp 61.468.400	100%	Rp 61.468.400	Rp 0	0%
7.01	01.02	9	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara dan dibayarkan Pajak danPerizinannya	2 Unit	Rp 37.630.000	2 unit	Rp 37.630.000	Rp 0	0%
7.01	01.02	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	9 unit	Rp 16.680.000	8unit	Rp 16.680.000	Rp -	0%

7.01	01.02	9	7	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara	0	Rp 0	-	Rp -	Rp -	0%
7.01	01.02	9	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	JumlahPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 unit	Rp 7.158.400 -	2 unit	Rp 7.158.400	Rp -	0%
7.01	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	100%	Rp 6.245.750	85,25 Nilai	Rp 6.245.750	Rp -	0%
7.01	02.2	2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kepada Masyarakat	100%	Rp 6.245.750	85,25 Nilai	Rp 6.245.750	Rp	0%
7.01	02.2	2	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 6.245.750	12 Laporan	Rp 6.245.750	Rp	0%
7.01	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100%	Rp 14.438.400	100%	Rp 14.198.400	- Rp 240.000	0,98%
7.01	03.2	1		Koordinasi Kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Musrenbang dan PKK Kecamatan		Rp 14.438.400	100%	Rp 14.198.400	- Rp 240.000	0,98%
7.01	03.2	1	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	11 Lembaga	Rp 10.150.700	11 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 10.150.700	Rp -	0%

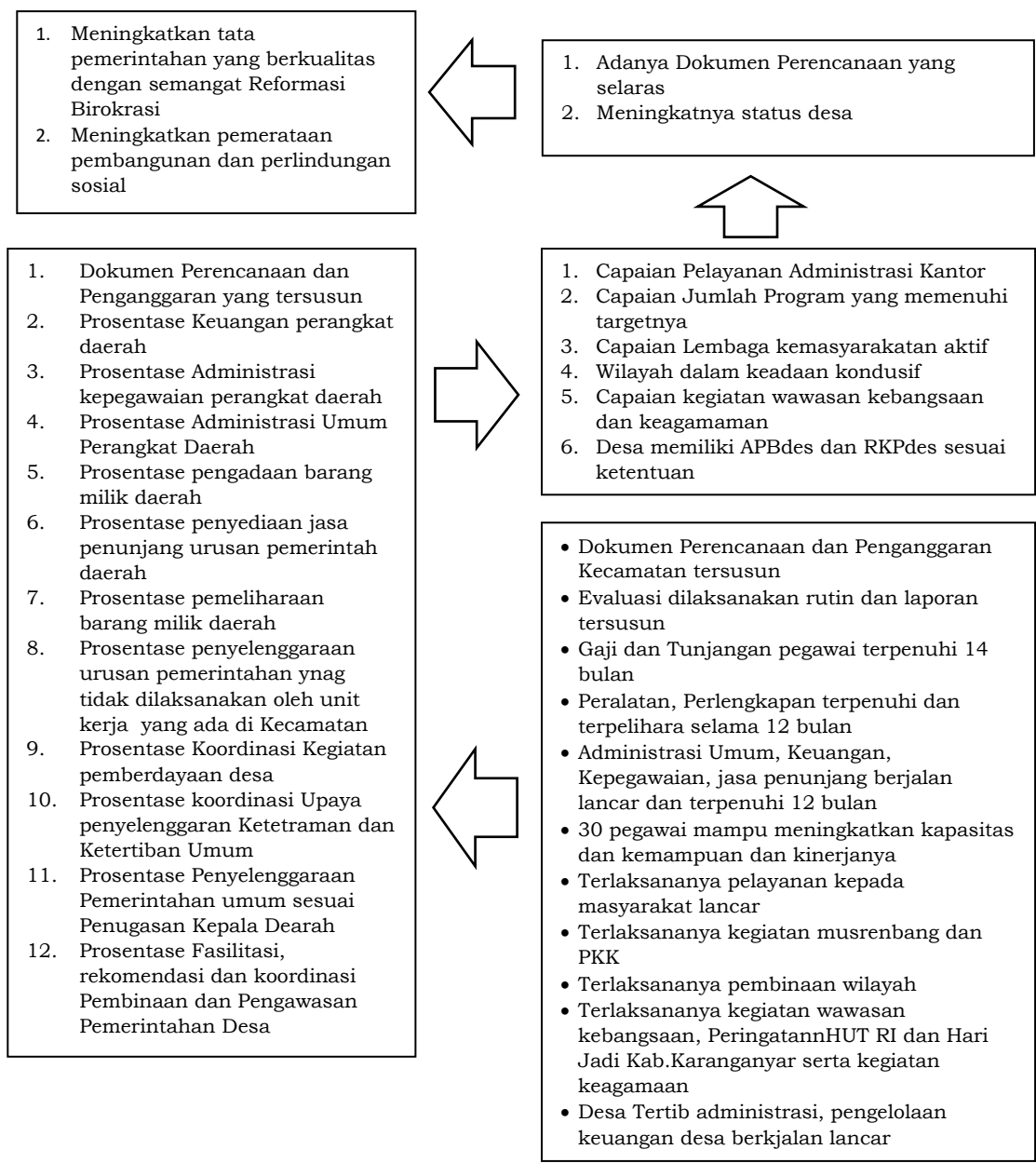
7.01	03.02	1	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	11 Lembaga	Rp 4.287.700	11 Laporan	Rp 4.047.700	Rp 240.000	0,98%
7.01	03.02	3		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan di Desa	-	Rp -	-	-	Rp -	0%
7.01	03.02	3	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga yang diselenggarakan	-	Rp -	-	Rp -	Rp -	0%
7.01	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Wilayah dalam Keadaan Kondusif	100%	Rp 126.263.000	100%	Rp 126.263.000	Rp -	0%
7.01	04.2	1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya keamanan, ketertiban dan kenyamanan wilayah	100%	Rp 126.263.000	100%	Rp 126.263.000	Rp -	0%
7.01	04.2	1	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	Rp 126.263.000	11 Laporan	Rp 126.263.000	Rp -	0%
7.01	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Kegiatan wawasan Kebangsaan dan Keagaman	100%	Rp 72.010.950	100%	Rp 69.850.950	-Rp 2.160.000	0,97%
7.01	05	01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terwujudnya Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 72.010.950	100%	Rp 69.850.950	-Rp 2.160.000	0,97%
7.01	05.2	01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan	100%	Rp 48.000.000	75 orang	Rp 48.000.000	Rp -	0%

				Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrastuku Umat Beragama Ras, Golongan Lainnya guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	100%	Rp 24.010.950	360 orang	Rp 21.850.950	- Rp 2.160.000	0,97%
7.01	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa memiliki APBDes dan RKPDes yang sesuai ketentuan	100%	Rp 40.904.150	100%	Rp 29.154.150	-Rp 11.750.000	0,7%
7.01	06.2	1		Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terwujudnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Rp 40.904.150	100%	Rp 29.154.150	-Rp 11.750.000	0,7%
7.01	06.2	1	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	Rp 13.782.700	11 Dokumen	Rp 9.932.700	- Rp 3.850.000	0,7%
7.01	06.2	1	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa dan Pemdayagunaan Aset Desa	100%	Rp 15.985.050	11 Dokumen	Rp 8.085.050	-Rp 7.900.000	0,5%

7.01	06.2	1	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	100%	Rp -	11 Dokumen	Rp -	Rp -	0%
7.01	06.2	1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan	100%	Rp 11.136.400	11 Dokumen	Rp 11.136.400	Rp -	0%

3.3. Indikator Kinerja Pelayanan OPD

Kinerja pelayanan OPD perlu dinilai, untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelayanan dilakukan oleh OPD. Penilaian ini dilakukan melalui indikator-indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Indikator kinerja dan kelompok sasaran akan menggambarkan pencapaian Renstra OPD. Terwujud tidaknya kinerja pelayanan Kecamatan Jumantono, yang ditunjukkan dengan capaian target beberapa indikator tersebut diatas. Keberhasilan pencapaian sasaran tergantung pada keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Jumantono, secara singkat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 3.3

Skema (flowchart) pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jumantono Tahun 2025

3.4. Dana Indikatif

Besarnya dana disusun berdasarkan kebutuhan riil tahun sebelumnya dan beban kegiatan yang akan dihadapi. Besarnya dana masih bersifat indikatif (belum menunjukkan kebutuhan dana yang sebenarnya, masih bisa berubah), dalam arti dana tersebut harus tersedia dengan volume kegiatan yang tertentu. Jika dibandingkan dengan Renja Penetapan, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025, secara singkat dapat dilihat pada tabel dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3
Persandingan Program, Kegiatan, Sub kegiatan, dan Pagu Indikatif pada Renja, APBD dan Renja Perubahan Tahun 2025

No	Uraian	Renja Penetapan	APBD	Renja Perubahan
1	Program	6	6	6
2	Kegiatan	9	9	9
3	Sub Kegiatan	25	25	25
4	Jumlah Dana	2.513.266.507	2.563.266.507	2.532.452.507

Perubahan Renja 2025 direncanakan :

- 1) Ada penambahan anggaran di subkegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar capaian kinerja OPD Rp. 400
- 2) Ada pengurangan anggaran di subkegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Rp. 26.559.900
- 3) Ada Pengurangan di subkegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan di Wilayah kecamatan 240.000
- 4) Ada Pengurangan di subkegiatan Jasa Pelayanan Umum Kanror Rp. 6.750.000
- 5) Ada pengurangan di subkegiatan Pembinaan antar suku dan intra suku, umat beragama, Golongan dan Ras Rp. 2.160.000
- 6) Juga ada pegurangan di subkegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa Rp. 3.850.000
- 7) Juga ada pegurangan di subkegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa Rp. 7.900.000

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2024-2026. Dokumen Renja Perubahan Tahun 2025 ini, disusun telah dilakukan sinkronisasi dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2025.

4.1 Catatan Penting dalam Penyusunan Perubahan Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kecamatan Jumantono. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 ini untuk mewujudkan adanya konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran di OPD dengan Daerah. Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Jumantono, sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Jumantono.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kecamatan Jumantono Tahun 2025 sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program dan kegiatan dalam Perubahan Renja ini baik yang bersumber dari APBD Kabupaten atau sumber dana lain harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya;
- 2) Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2025;

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Karangpandan Tahun 2025 diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Karangpandan secara efektif dan efisien dengan melibatkan semua pihak yang berkompeten. Dengan sumber daya manusia yang terbatas dan teknologi yang semakin maju serta etos kerja yang baik diharapkan mampu merubah pola pikir/ *mindset*.

Semoga Perubahan Renja Kecamatan Jumantono Tahun 2025 ini dapa dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan daerah kabupaten Karanganyar Tahun 2025. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen Renja ini.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

ROBER CHRISTANTO

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kepala Bidang Sosial Budaya Baperlitbang	

